

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia yang termasuk negara kita sendiri juga memberi perhatian khusus pada kegiatan pembangunan. *Good Governance* merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip – prinsip *Good Governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *Good Governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Penyelenggaraan prinsip *Good Governance* di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik. Begitu pula di pemerintahan yang ada di daerah termasuk Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, berbagai macam kegiatan perbaikan fasilitas dan infrastruktur dikerjakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. Salah satu bentuk perhatian dari kegiatan pembangunan yang

diberikan pemerintah adalah perhatian bantuan berupa infrastruktur serta fasilitas lain yang ada di desa, juga bantuan kepada warga yang memiliki rumah tidak layak huni, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius pemerintah, dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat yang rendah beberapa daerah di Indonesia. *Good Governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008). *Good Governance* merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun kegiatan yang langsung kepada masyarakat yaitu tentang penyaluran bantuan tau yang bersifat sosial. Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik. (Mahmudi,2010:8). Menurut Robinson (dalam Harun, 2009: 73)

Sampai saat ini isu *Good Governance* telah diasumsikan di depan masyarakat sebagai kebutuhan yang sangat mutlak bagi kehidupan sosial, perkembangan ekonomi dan politik (Bank Dunia, 1989, UNESCO, 2005;Nanda, 2006; Hout, 2007; Gisserlquit, 2012), pemerintahan yang belum baik terus menjadi sumber kekhawatiran dan tantangan terbesar untuk sebagian besar negara. Pada era global, organisasi yang kompetitif tergantung pada keunikan sumber daya manusia dan sistem untuk mengelola

Sumber Daya Manusia (SDM) secara efektif untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Dengan demikian pemerintah berinisiatif untuk merencanakan program perbaikan semua fasilitas dan infrastruktur di desa serta program “Seribu Rumah” itu merupakan Nawa Karsa Bupati Gresik dan merupakan program Pemerintah Kabupaten Gresik, dimana yang tercakup di dalamnya yaitu program perbaikan fasilitas infrastruktur seperti jalan poros desa, penerangan jalan desa, saluran yang ada di desa serta BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), Bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus), Bantuan APBD Gakin (Warga Miskin) yang semua usulan bantuan di peroleh dari pemerintah desa (PEMDES), semuanya akan dikembalikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat juga guna meningkatkan taraf hidup setiap masyarakat yang ada. Program pembangunan tersebut hanya difokuskan pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik sebagai wujud pemerataan pembangunan pada setiap daerah kecamatan, dalam hal ini Kabupaten Gresik menjadi salah satu daerah yang menerima bantuan dari program tersebut. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik).

Good Governance tidak lagi dikenal sebagai konsep baru, akan tetapi konsep *Good Governance* telah lama dikenal, sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan mengenai good governance dapat ditelusuri melalui tulisan J.S Endarlin (Setyawan, 2004:223) yang mengatakan governance merupakan suatu terminologi yang menggantikan istilah government yang menunjuk pada penggunaan otoritas politik,

ekonomi administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Tata pemerintahan yang baik dianggap sebagai prasyarat bagi dunia yang damai dan terbuka, hal itu juga dianggap sebagai elemen penting yang dapat merumuskan suatu strategi pembangunan. *Governance* juga akan dipelajari secara mendalam atas dasar berbagai alur isu, dalam konstitusi masing-masing negara dengan kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Kualitas tata kelola sebagian diakui oleh efisiensi pemerintah dalam melaksanakan strategi yang baik. Peran pemerintah dapat memperluas pembentukan hak kepemilikan baik pada unit perlindungan polisi, peradilan dan pertahanan nasional. Tata kelola atau pemerintahan yang baik di sektor publik maupun swasta dianggap sebagai faktor keberhasilan utama (Wymeersch, 2006).

Terjadinya krisis kepercayaan dimana dulu semua kegiatan bantuan terutama bantuan *fasilitas* serta *infrastruktur* jalan dan saluran yang ada di desa, serta pembongkaran rumah dilaksanakan oleh desa sendiri atau Panitia Pelaksana Desa (PPD) dilaksanakan pemerintah desa serta pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat dan lembaga yang ada di desa itu sendiri, sehingga hasil dan anggaran tidak bisa maksimal serta tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan masyarakat selaku penerima bantuan, hal itu dikuatkan oleh informasi dari warga masyarakat dan penerima bantuan itu sendiri. Dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kinerja pegawai dengan Sumber Daya Manusia sesuai dengan hakekatnya, berfokus pada perwujudan pegawai yang

kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas. Upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, wakil rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif, media (wartawan) sebagai media informasi kepada masyarakat dan juga oleh lembaga - lembaga swadaya masyarakat karena itu merupakan pilar – pilar dari pemerintah yang baik. *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan kesinergian interaksi yang konstruktif diantara tugas dan fungsi *state, private sector and society* (Dwiyanto,2005:82).

Untuk mencapai keberhasilan dari setiap program pelatihan umumnya disusun berdasarkan kebutuhan akan peningkatan kompetensi yang diharapkan akan dipenuhi atau pemenuhan gap kinerja antar pegawai. Program pelatihan tentunya disusun sesuai dengan apa yang kita butuhkan sehingga program pelatihan yang nantinya diselenggarakan pasti berjalan baik dan lancar. tentunya menjadi sangat penting untuk menilai sebuah program dalam menghasilkan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan tugas sebagai pelakasa pekerjaan dan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang lebih baik selain itu, dalam peningkatan dan kemajuan masyarakat serta kesejahteraan yang diikuti dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang mempunyai arti individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang

memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya yang dimiliki masyarakat pada suatu wilayah adalah merupakan suatu tingkat untuk membuat kepercayaan masyarakat bisa tumbuh kembali serta diikuti dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas.

(Benny A. Pribadi.(2014) Desain Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi).

Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga - lembaga tinggi negara, dan pemilihan umum dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik. *Good Governance* mempunyai prinsip terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan hakekatnya, berfokus pada perwujudan pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas, yang ada di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, yang terjadi selama ini belum sepenuhnya di dinas menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), setelah adanya perubahan di masa reformasi juga telah mampu membawa kondisi yang semakin baik, sehingga mengantarkan pemerintahan khususnya di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi

pemerintahan. Dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena pemerintahan yang baik (*Good Governance*) itu sendiri yang akan mengendalikan faktor - faktor lain.

Dalam kemajuan ilmu untuk mendapatkan prestasi yang baik dituntut oleh pemerintah, pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) para pegawai yang ada dilingkungan pelayanan masyarakat (Abdi Negara) yang didapat dan diraih oleh masyarakat tersebut, yang diperoleh dari berbagai upaya termasuk upaya dari kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Setelah mengetahui pengertian pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga dapat dijadikan pemahaman. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta pegawai yang harus mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas sebagai topik dengan judul “Analisis Pelaksanaan Prinsip Good Governance Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Studi Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik”. Tujuan *Good Governance* adalah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain

negara, sektor swasta dan masyarakat”. Maka dari itu tujuan *Good Governance* tercapai disuatu Negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan *Good Governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala - kendala yang melanda suatu Negara untuk bias mewujudkan tata pemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan *Good Governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerjasama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada Negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan ataus tandar yang telah ditetapkan. (Kurniawan (2005:12)

Prinsip – prinsip *Good Governance* menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat 4 prinsip utama *Good Governance*, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas publik
2. *Value formoney*
3. Transparansi
4. Efektivitas manajemen sumber daya manusia

Dari kendala *Good Governance* yang telah disinggung dapat membuat saya memberikan dugaan awal terhadap lokasi penelitian di Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Kabupaten Gresik, yang diduga menemukan sejumlah gejala yang mengindikasikan belum baik

Prinsip-prinsip *Good Governance* dari aparaturnya setempat yang belum dijiwai secara baik, dan dapat dijelaskan berbagai gejala sebagai berikut :

1. Tidak adanya transparansi dalam penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan kantor Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
2. Perekrutan tenaga kerja tidak bersandar pada profesi (TUPOKSI) dan ketrampilan yang dimiliki.
3. Masih kurangnya adanya Sumber Daya Manusia (SDM) para pegawai dalam kegiatan kepada masyarakat.
4. Memberikan Informasi yang masih kurang kepada warga/masyarakat yang membutuhkan bantuan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni.
5. Perekrutan pegawai struktural melirik pada kelompok politik (adanya kontrak politik).

Dengan melihat pada dugaan awal yang terjadi untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya-upaya dalam mewujudkan *Good Governance* dengan baik dan benar sehingga dapat mempersiapkan para pegawai yang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai moral BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. (Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN).

Agar dapat mengembangkan dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi mencapai hasil kerja yang baik pula. Kondisi ini sering juga terjadi dalam era pemerintahan modern dewasa ini, fungsi pokok birokrasi dalam negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan

menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu negara (Suhardono, 2010:72).

Dalam konteks tersebut birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Dwipayana 2003:65) yakni: pertama, fungsi pelayanan publik/pelayanan kepada masyarakat (publik services) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan document, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan keamanan bagi penduduk. Kenyataan fungsi birokrasi pemerintah di daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Sikap mental yang arogan dan etos kerja rendah dikalangan birokrat sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selama ini. Berdasarkan kondisi masalah yang telah dijelaskan diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dibawah sorotan judul: Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Studi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip – prinsip (*Good Governance*) di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dengan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada?

2. Apakah kinerja pegawai pemerintah sebagai Abdi Negara dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang harus mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat menerapkan prinsip - prinsip (*Good Governance*) ?
3. Bagaimana kinerja pegawai pemerintah atau Abdi Negara sebagai pembuat peraturan dan kebijakan yang sesuai prosedur (*Demokrasi dan Birokrasi*) dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah penulis hanya meneliti pada ruang lingkup pelaksanaan prinsip *Good Governance* terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dengan penelitian ini, yang menjadi pembatasan masalah adalah:

1. Prosedur Birokrasi yang diharapkan dan sesuai dengan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
2. Diharapkan pegawai di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. yang

mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan hakekatnya, berfokus pada perwujudan pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah dalam persaingan global saat ini, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

3. Tugas dan fungsi pegawai Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, bisa membantu pemerintah sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan bantuan infrastruktur atau rumah kepada masyarakat dengan memiliki mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang kompeten dan berkualitas.
4. Pegawai Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan hakekatnya, berfokus pada perwujudan pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah, dapat memberikan pelayanan informasi, sosialisasi data sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan bantuan infrastruktur atau rumah kepada masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta di ikuti dengan Manajmen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang

sesuai dengan perwujudan pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sesuai dengan prosedur dan birokrasi di pemerintahan.

2. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan hakekatnya, berfokus pada perwujudan pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah dengan tugas dan fungsinya, maka semua kegiatan yang ada di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik bisa sesuai dengan harapan pemerintah yang baik (*Good Governance*) terutama Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bagaimana kinerja pegawai yang sesuai tugas dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dalam pelaksana kegiatan bisa menata, mengevaluasi kembali kekurangan – kekurangan dalam pendataan awal, proses update, verifikasi dan koordinasi dalam kinerja pegawai yang sudah mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki

keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah

4. Memberikan informasi tentang kegiatan Sistem pendataan, Sosialisasi, Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan bantuan infrastruktur dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sesuai dengan diharapkan (tepat sasaran) dengan menerapkan (*Good Governance*) serta Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus pada perwujudan pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah. Khususnya di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam studi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diikuti dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah. di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Gresik ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan serta masukan ide dan gagasan kepada Pemerintah terutama dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia

(SDM) terutama Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

2. Penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di ikuti dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah, serta menjadi aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Serta dapat berguna juga bagi pembaca agar menambah wawasan, menambah pengetahuan secara teknis maupun non teknis.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah, bagi semua pegawai sehingga dalam pelayanan, pelaksana kegiatan bantuan infrastruktur dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bisa dengan cepat dan proposional serta tepat sasaran, sesuai dengan kinerjanya menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.5.2 Praktis

1. Penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada pemerintah untuk menerapkan Prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan

berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah, untuk memberikan informasi dan pelayanan secara transparan dan tepat saran, kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang ada (Kecamatan, Desa).

2. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah, sehingga prosedur birokrasi pelaksanaan pekerjaan dapat menangani kegiatan dari masalah, cara mengajukan data awal yang diambil atau diajukan melalui Basis Data Terpadu (BDT), dan alur pengajuannya harus melalui birokrasi dan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).
3. Dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), bagi instansi di Pemerintah Kabupaten Gresik yang kegiatannya dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, sehingga diharapkan dapat memberikan gagasan serta ide – ide bagi semua pegawai dilingkungan tersebut bisa mempunyai daya saing karena di era seperti ini semua pegawai dituntut untuk mempunyai ilmu pengetahuan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah, sehingga

prosedur birokrasi pelaksanaan pekerjaan dapat menangani kegiatan dari masalah, yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dan aktivitas pemerintah, sehingga prosedur birokrasi pelaksanaan pekerjaan dapat menangani kegiatan dari masalah dan sesuai dengan kemampuannya untuk menuju Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelayanan terutama penyalur serta pelaksanaan kegiatan bantuan, sehingga bisa bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Gresik.